

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tata Tertib Sekolah

2.1.1.1. Pengertian Tata Tertib

Tata tertib merupakan bentuk aturan – aturan yang harus ditaati atau dipatuhi sebagai wujud dalam kehidupan sadar akan segala bentuk hukum dan aturan dalam. Pada lingkup masyarakat diatur dalam bentuk peraturan maupun norma, adapun norma dalam lingkup masyarakat seperti norma agama, norma hukum, norma kesucian dan norma kesopanan. Norma bersifat memaksa atau dengan kata lain bersifat keharusan masyarakat untuk menaati aturan apabila terdapat siapa saja pada lingkup masyarakat melakukan pelanggaran aturan pasti akan dikenai sanksi. Maka oleh karena itu setiap lingkungan masyarakat, kelembagaan organisasi baik swasta maupun pemerintahan tentu saja memiliki aturan yang berkewajiban dan kepatuhan untuk ditaati. Adapun menurut Wardhani & Ihsan, (2021) tata tertib merupakan aturan yang diatur terkait segala aktivitas yang mengatur seluruh yang ada pada suatu lingkungan masyarakat dan akan diberikan sanksi terhadap siapa saja yang melanggarnya. Selain itu menurut Demilia & Rozie, (2023) bahwa tata tertib adalah beberapa peraturan yang dibuat dan disepakati bersama dalam suatu lingkungan masyarakat atau tata kehidupan.

Berdasarkan pengertian dan pemahaman tentang tata tertib di atas maka dapat disimpulkan bahwa tata tertib merupakan suatu bentuk peraturan yang telah

disusun dan disepakatin secara operasional dan tertulis dengan tujuan untuk mengatur segala tingkah laku dan sikap personil pada suatu tatanan lingkungan masyarakat dengan senantiasa dalam mengikuti aturan yang ada secara tertib. Berkaitan dengan lingkungan sekolah juga memiliki tata tertibi yang telah disusun oleh pihak sekolah untuk diterapkan para siswa/I yang ada. Para siswa/I diwajibkan untuk taat teradap seluruh aturan dan peraturan yang ada disekolah, oleh karena itu sangat penting terkait dengan system dan aturan sekolah, seperti yang dijelaskan oleh Utomo & Nursalim, (2019) menyatakan bahwa tata terib merupakan bagian terpenting untuk menjaga suatu lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif seingga proses pembelajaran menjadi produktif. Dalam hal ini juga akan dapat memicu siswa/I untuk mengembangkan potensinya dengan optimal. Tata tertib juga dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil dari pelaksanaan yang konsisten (tatap azas) dari peraturan yang ada. Lebih eksplisit Rifa'i, (2020) menjelaskan tata tertib ialah peraturan secara sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat dilingkungannya. Pada penerapan tata tertib Yurnidawati, (2018) mengemukakan bahwa dalam membangun disiplin siswa/I maka dibutuhkan suatu pengajaran yang responsif melalui budaya disiplin sesuai aturan sekolah, pendekatan tersebut merupakan strategi yang efektif dalam merangsang peserta didik melalui melalui pembiasaan. Menurut Astini, (2022) mengemukakan bahwa peserta didik yang menjalin ubungan dan kerjasama yang baik dengan sekolah maupun guru, peraturan sekolah, maka semakin kecil pelanggaran yang dilakukan peserta didik disekolah. Semua peraturan dapat berjalan dengan baik apabila seluruh elemen yang ada disekolah baik guru, aparat sekola dan siswa/I

mendukung tata tertib dan aturan dengan cara menerapkan dan mentaatin aturan tersebut. Tanpa adanya dukungan dari seluru pihak sekolah maka tata tertib tidak akan berjalan dengan maksimal. Tata tertib sekola merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan dan terangkai satu dengan yang lainnya serta akan menjadikan proses belajar dan mengajar menjadi lebih efektif dan efisien.

2.1.1.2. Tujuan Tata Tertib

Tujuan adanya tata tertib adalah untuk menciptakan suasana yang aman, tenang dan terkendali serta menunjang kelancaran pada proses pembelajaran. Menurut Rifa'i, (2020) bahwa tata tertib sekolah bertujuan agar peserta didik memahami dan mengetahui tugas, hak dan kewajibannya di sekolah, selanjutnya agar peserta didik mampu memahami dan mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, meningkatkan kreativitas siswa/I dan terhindar dari permasalahan yang akan mempersulit dirinya dan terlibat dengan guru, terakhir bertujuan agar peserta didik mengetahui dan melaksanakan dengan baik pada segala kegiatan yang telah disusun oleh pihak sekolah baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Sedangkan Demilia & Rozie, (2023) tujuan dibuatnya peraturan disiplin sekolah antara lain :

1. Untuk mengembangkan kesadaran perilaku siswa, disiplin diri, tanggung jawab, kontrol diri dan akuntabilitas dalam perilaku
2. Untuk memungkinkan siswa melakukan tugas sesuai dengan pembelajaran mereka
3. Untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa
4. Mendorong setiap siswa untuk memahami dan menghormati hak-hak orang lain

5. Untuk menegaskan kerjasama serta kemandirian yang bertanggung jawab dalam pembelajaran
6. Untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, menghargai orang lain
7. Untuk memungkinkan resolusi konflik yang rasional

Selanjutnya menurut Zulaimina & Hasanah, (2022) bahwa tujuan dari tata tertib adalah untuk mengartikulasikan perilaku yang dapat diterima di sekolah, mempromosikan perilaku disiplin dan mandiri, membangun lingkungan sekolah yang disiplin dan terarah, menciptakan sekolah terorganisasi dengan baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Sedangkan fungsi dari peraturan sekolah menurut Fathnin, (2022) sebagai suatu sistem dalam mengkomunikasikan pada kinerja peran perangkat sekolah untuk memberikan keteraturan.

Berdasarkan uraian di atas tentang tujuan tata tertib dapat disimpulkan bahwa tata tertib bertujuan agar terciptanya suasana aman, tenang demi kelancaran proses pembelajaran, penting penerapan tata tertib sebagai proses penanaman, pengembangan, keterampilan setiap individu sehingga perilaku seseorang diatur sesuai dengan peraturan yang ada.

2.1.1.3. Unsur – unsur Tata Tertib

Dalam mewujudkan lingkungan dan situasi yang tertib, maka sekolah merupakan sebagai lembaga pendidikan yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengawasi berjalannya tata tertib. Semua akan berjalan dengan baik apabila adanya kerja sama antar guru dan siswa/I yang ada

pada lingkungan sekolah. Menurut Anindyawati, (2022) mengemukakan ada lima kategori utama yang harus dibangun, adapun itu diantaranya yaitu

1. Aturan relasional merupakan aturan tentang bagaimana menjadi baik dan bagaimana menjadi berperilaku baik dalam hubungannya dengan orang lain.
2. Aturan penataan merupakan aturan yang ditujukan untuk menata dan memelihara kegiatan yang terjadi di sekolah atau dengan kata lain penataan dan pemeliharaan secara fisik seperti pemeliharaan fasilitas sekolah saat kegiatan sekolah sedang berlangsung.
3. Melindungi aturan merupakan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan
4. Aturan pribadi merupakan meminta refleksi diri, bertanggung jawab atas perilaku diri sendiri dalam bertindak.
5. Aturan etika merupakan aturan yang memantapkan adat dan tradisi di sekolah maupun di masyarakat tentang berperilaku dalam lingkungan sosial.

Dari berbagai bentuk kewajiban yang harus diterapkan dan ditaati maka ada juga beberapa hal yang perlu dihindari bagi seseorang agar terhindar dari sanksi. Karena pada esensinya tata tertib yang ada di sekolah baik itu secara umum maupun secara khusus meliputi tiga unsur seperti pemuatan atau tingkah laku yang diwajibkan dan dilarang, selanjutnya akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab dari pelanggar peraturan, terakhir cara atau langkah – langkah dalam menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai tata tertib sekolah tersebut.

Berdasarkan unsur – unsur di atas maka pihak manajemen sekolah harus melakukan melalui pendekatan yang konsisten dalam penerapannya untuk

menopang system peraturan tersebut. seperti yang dikemukakan Irby et al., (2019) bahwa rangsangan ekstrinsik secara konsisten bertujuan untuk memotivasi peserta didik untuk berperilaku dengan cara yang diinginkan namun tidak bertentangan pada konteks disiplin sekolah, seperti memberikan pujian dan penghargaan teradap siswa/I yang taat peraturan dan berprestasi dalam belajar. Selanjutnya membentuk dan mengembangkan perilaku peserta didik ensosialisasikan peraturan sekolah dengan memberikan penguatan atau pengaru positif terhadap peserta secara konsisten. Pada pelaksanaan strategi tata tertib juga bertujuan untuk mempertahankan disiplin yang positif dalam lingkungan sekolah dengan cara menekankan untuk mengajarkan peraturan sekolah pada siswa/I, mendorong orang tua untuk terus mengingatkan bahwa pentingnya mematuai aturan sekolah bagi yang melanggar aturan. Maka segala bentuk peraturan yang berubungan dengan tata tertib baik mengenai segala kegiatan atauoun aktivitas yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan seperti hal yang menyangkut keadiran dalam proses belajar dan mengajar, atribut sekolah atau seragam sekola juga ubungan antar lingkungan sekolah wajib dipatuhi. Pada dasarnya hal dikatakan bahwa peserta didik dikatakan taat terhadap tata tertib sekolah apabila memiliki kesadaran tersendiri untuk mematuai segala peraturan, bertanggung jawab atas tugas – tugasnya, mampu mengendalikan diri, sadar dan mengamalkan setiao nilai – nilai yang terkandung dalam peraturan, mampu menjadi teladan, berani, jujur, tegas dalam menjalankan aturan, konsistren teradao aturan, berhubungan baik dengan lingkungan sekolah, mampu bekerja sama dengan orang lain, menerima segala peraturan yang ada dan mampu beradaptasi di sekola serta mampu menintropeksi diri.

2.1.1.4. Penyusunan Tata Tertib Sekolah

Menurut Utomo & Nursalim, (2019) mengemukakan dalam penyusunan

Tatat tertib sekolah memiliki pedoman yaitu :

1. Didalam merumuskan tata tertib harus melibatkan aspirasi siswa orang tua siswa yang sesuai dengan visi dan misi sekolah.
2. Segala peraturan tata tertib kedisiplinan yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki, dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi atas pelanggarnya, merupakan kesepakatan semua pihak yaitu siswa, orang tua, guru, guru pembimbing, dan kepala sekolah.
3. Pada perumusan peraturan tata tertib harus berlandaskan pada kesepakatan yang kuat antara semua elemen sekolah dan konsisten dalam penerapannya.
4. Tata tertib sekolah harus tetap memberi tempat kepada siswa dalam pengembangan keaktivitas, mengapresiasi diri dan mengembangkan setiap kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya.
5. Peraturan tata tertib sekolah dibuat terkonsep perlu ditaati oleh lingkungan sekolah dengan sanksi yang sangat jelas yang dapat membuat peraturan menjadi kaku dan memaksa, tetapi bagaimana mengkondisikan sekolah agar bisa membuat orang untuk tidak melakkan pelanggran.
6. Peraturan tata tertib yang diterapkan diharapkan membentuk mental kedisiplinan supaya disiplin dimiliki bukan karena takut mendapatkan sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran
7. Peraturan disiplin, tata tertib dan juga sanksinya diarahkan untuk membangun budaya perilaku yang mencerminkan pengaruh positif dan sikap disiplin di lingkungan siswa dan warga sekolah lainnya.

8. peraturan disiplin tata tertib dan juga sanksinya harusnya tetap memberi tempat bagi berkembangnya kreativitas dan sikap kritis warga sekolah.
9. Struktur penyusunan aturan disiplin dan tata tertib dapat dilakukan dalam beragam jenis
10. Peraturan disiplin dan tata tertib beserta sanksinya dibuat secara tertulis dan mendapat pengesahan oleh kepala sekolah, supaya semua elemen mengetahui dan memahami setiap poin peraturan disiplin tersebut.
11. Selain peraturan tentang memberikan sanksi, sekolah juga bisa membuat aturan terkait pemberian reward kepada warga sekolah sebagai pemecut motivasi siswa dalam menaati peraturan disiplin dan tata tertib sekolah.

Sejalan dengan yang dijelaskan diatas, peserta didik diberi ruang kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembuatan peraturan sekolah, ini berguna pada peningkatan kreativitas peserta didik dalam merencanakan, merefleksikan, membuat, dan mendiskusikan tentang penerapan aturan yang relevan dengan lingkungan sekolah. Bahwa suatu pendekatan disiplin moral telah menjadi beberapa pilihan yang klasik. Salah satunya dengan cara mencari masukan dan pendapat dari semua kelas, dan dari masukan yang didapatkan kemudian dikembangkan menjadi satuan aturan yang utuh dari pendapat-pendapat yang digolongkan. Kemudian adapun alternatif yang lainnya memakai penataan peraturan kooperatif hanya terhadap beberapa kelas saja. Kemudian pilihan lainnya bagi setiap guru dengan biasa memperlihatkan suatu daftar harapan perilaku dihari pertama, lalu berdiskusi dengan singkat, dan selanjutnya mengikutsertakan para peserta didik dengan lebih giat dalam aktivitas-aktivitas berikutnya yang lebih dalam untuk mengembangkan peraturan-peraturan untuk

mendapatkan kesepakatan dengan permasalahan khusus yang lebih meningkat. Seperti itulah penyusunan dalam membuat tata tertib sekolah agar antara sekolah dan peserta didik bersinergi dalam menerapkan peraturan untuk kebaikan bersama.

2.1.2. Disiplin

2.1.2.1. Pengertian Disiplin

Disiplin adalah sebagai bentuk nilai pada karakter yang ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan salah satu sikap dan pembelajaran bertujuan untuk membentuk kepribadian seseorang. Penanaman karakter disiplin bisa dilakukan melalui proses pembelajaran, peraturan-peraturan yang harus ditaati, dan interaksi di lingkungan sekitar. Proses ini yang nantinya akan mencerminkan kepribadian dari personal tersebut menjadi disiplin. Menurut Aragam et al., (2022) disiplin merupakan sikap dan perilaku yang muncul dari sebuah kebiasaan dalam mengikuti dan menaati peraturan, hukum, ataupun perintah. Rubini, (2019) menjelaskan disiplin merupakan suatu hal yang menyangkut pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Sikap disiplin sering ditunjukkan kepada orang-orang yang selalu tepat waktu, taat terhadap aturan, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan perilaku ataupun tingkah laku seseorang menjadi kebiasaan yang muncul dari dalam dirinya dengan mematuhi dan mengikuti aturan yang ada.

Pendidikan berkarakter menegaskan bahwa disiplin itu apabila ingin berhasil harus mengubah anak-anak dari dalam dirinya. Seperti Wardhani & Ihsan, (2021) dengan disiplin harus mampu merubah cara mereka dalam bersikap, cara mereka dalam berfikir dan merasa sesuatu. Disiplin harus mendukung mereka

dalam mengembangkan hal-hal positif berupa memiliki rasa hormat, memiliki empati, penilaian yang baik, dan mengontrol diri. Intinya, disiplin yang efektif ialah harus berbasis karakter. Disiplin itu harus memperkuat karakter siswa, bukan semata-mata untuk mengatur perilaku mereka. Seperti yang dijelaskan Aras, (2021), bahwa orang yang memiliki disiplin didalam dirinya dikendalikan melalui dorongan hati dan memfokuskan energi dalam mencapai hal-hal tanpa suatu unsur paksaan dengan aturan berlaku bagi diri sendiri.

2.1.2.2. Indikator Disiplin

Orang dengan disiplin tinggi menetapkan tujuan dan membangun rutinitas yang membantu mereka mencapai tujuan tertentu. Karakter disiplin merupakan bentuk perilaku yang dapat ditunjukkan seorang siswa disekolah. Ada beberapa indikator disiplin yang diungkapkan dan disebutkan oleh Kemendiknas (2010:33) yaitu Siswa sering datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu, Mengerjakan tugas tugas yang diberikan merupakan tanggung jawabnya, Duduk pada tempat yang telah disediakan, Menaati segala peraturan di sekolah, Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah, selanjutnya Guarango, (2022), mengemukakan dalam mengontrol perilaku peserta didik perlu suatu rancangan pendekatan alternatif untuk disiplin di kelas. pendekatan ini meliputi :

1. Hubungan antara guru dan siswa perlu erat, mendukung, dan saling percaya
2. Sekolah perlu menjadi komunitas yang peduli dan demokratis, mendukung penuh peserta didik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
3. Peserta didik membutuhkan kesempatan untuk berdiskusi dan memperbaiki pemahaman mereka tentang nilai moral dan bagaimana mereka mereka mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari.

4. Mengajarkan peserta didik bertindak sesuai dengan nilai-nilai pro sosial. Karakter atau sikap disiplin menjadi bentuk dari karakter yang baik dan membawa seseorang kepada hal kebaikan.

Jika benar-benar diaplikasikan ini akan membawa keuntungan bagi pribadinya menjadi lebih baik. Karakter disiplin ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan dan dapat mematuhi aturan yang berlaku. Tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di rumah maupun masyarakat, sehingga semua kebiasaan atau kegiatan menjadi lebih terarah dan teratur.

2.1.3. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2.1.3.1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn

Dalam membentuk dan menyiapkan generasi muda agar menjadi warga negara yang mampu berperan, bertanggung jawab sebagai warga negara, menjadi warga negara yang mampu berperan, bertanggung jawab sebagai warga negara memiliki sebuah proses yang cukup lama, sekolah juga termasuk sebagai sarana pendidikan dalam menyiapkan warga negara yang baik melalui proses belajar dan mengajar. Dalam hal ini warga negara yang baik merupakan warga negara yang memahami aturan dan mampu melaksanakan dengan baik sebagai warga negara yang memiliki hak – hak dan kewajibannya, seperti peka dan bertanggung jawab secara sosial dan mampu memecahkan dari setiap masalah, baik yang ada pada dirinya maupun masalah kemasyarakatan dengan cara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya. Pada setiap negara proses pembelajaran PPKn memiliki karakteristik dan model pembelajaran yang berbeda, seperti teori tentang PPKn mengharuskan setiap peserta didik mempelajari kemampuan keterampilan disposisi sebagai partisipasi secara efisien didalam demokrasi, pengarahan tentang

pembelajaran nilai pada penekanan terkait toleransi, saling menghormati. Khatib & Alzoubi, (2022) berpendapat bahwa pembelajaran PPKn memfokuskan pada demokrasi, partisipasi publik, hak dan tanggung jawab setiap individu sebagai warga negara. Dalam konteks PPKn, harus lebih menekankan pada sistem politik, kesetaraan, kemampuan berpartisipasi dalam ruang publik. Kemudian Kennedy (2019:58) menjelaskan bahwa pembelajaran PPKn sebagai pengembangan keterampilan dan nilai-nilai untuk menjadi warga negara yang baik, berpengetahuan luas, partisipatif, serta toleransi. Proses pembelajaran tersebut berbasis disiplin yang didukung dengan persiapan pedagogis yang sesuai dengan pembelajaran di kelas. Pendapat lain dikemukakan Strandbrink (2017:42) bahwa orientasi pembelajaran ppkn tidak hanya mencakup pendidikan politik, tetapi dalam perspektif lain PPKn merancang dan mengimplementasikan tentang pembelajaran sifat atau watak karakter, etika, religius, dan budaya kewargaan. Pendapat yang sama diutarakan oleh Sundberg (2016:139) bahwa PPKn merupakan proses pembelajaran konstektual dan inovatif yang mengangkat isu budaya dan politik secara partisipatif dilingkungan masyarakat.

Pendidikan karakter diwajibkan untuk dikembangkan semua mata pelajaran. Akan tetapi, dalam pengembangan pendidikan karakter yang memiliki keterkaitan sangat dekat ialah PPKn. Pembelajaran PPKn memiliki keterkaitan dengan pendidikan karakter karena keduanya bukanlah suatu yang terpisahkan dan diajarkan dalam kondisi terisolasi satu sama lain, tetapi PPKn merupakan mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter. Sebagai wujud dalam pembentukan watak dan beradaban bangsa melalui PPKn yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab melalui “*value-based education*” (Winarno 2015:354). Dalam pembelajarannya Curry (2010:253) menjelaskan PPKn harus menciptakan interaksi sosial sebagai upaya mewujudkan budaya partisipatif pada siswa salah satunya dengan diskusi kelas. Melalui pembelajaran PPKn siswa dituntut untuk melekat sosial agar menjadi warga negara yang berguna di kehidupan masyarakat yang demokratis.

Sesuai bunyi penjelasan pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa PPKn wajib melalui PPKn agar menjadikan peserta rmuat didalam kurikulum sekolah dengan tujuan untuk membentuk peserta didik agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka peran sekolah dalam memberikan pengaruh positif pada peserta didik sehingga bagian penting dalam PPKn yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan/keahlian kewarganegaraan), dan *civic disposition* (watak/karakter kewarganegaraan) dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi warga negara yang baik. Pengintegrasian pendidikan karakter dan PPKn adalah salah satu cara menuju pada pendekatan yang komprehensif dan efektif. Pada literatur lain menjelaskan kajian dalam PPKn mengarah kepada nilai-nilai karakter secara umum dimasyarakat, sedangkan pendidikan moral lebih menekankan pada karakter individu yang terdapat didalam nilai-nilai masyarakat. Menurut Jotia (2011:137) PPKn memiliki konsep bahwa setiap warga negara dididik supaya memiliki kemampuan dalam mengembangkan kompetensi diri sebagai masyarakat sehingga mampu untuk berpartisipasi secara aktif kehidupan bernegara. Sejalan pendapat diatas, Jasmin B–Y Sim & Ee Ling Low (2012:384) menjelaskan bahwa PPKn secara umum

diartikan sebagai untuk mengenalkan dan mendorong generasi muda dalam memainkan peran yang lebih besar dimasa depan dengan lebih efektif berpartisipasi dalam politik, sosial dan ekonomi. Keterlibatan secara langsung warga negara melalui penyampaian pemikiran secara langsung didepan umum sebagai bentuk membangun sikap kritis generasi muda sebagai warga negara. Dengan pengembangan kecerdasan generasi muda melalui PPKn dapat diimplementasikan melalui pemahaman, keterampilan sosial, dan intelektual, dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan sekitar. Keterlibatan secara langsung warga negara melalui penyampaian pemikiran secara langsung didepan umum sebagai bentuk membangun sikap kritis generasi muda sebagai warga negara. Dengan pengembangan kecerdasan generasi muda melalui PPKn dapat diimplementasikan melalui pemahaman, keterampilan sosial, dan intelektual, dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan sekitar.

2.1.3.2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Secara konseptual PPKn memiliki tujuan agar setiap warga negara terutama generasi muda atau peserta didik mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam lingkup nilai dan juga moral pancasila, nilai dan norma Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen terhadap Bhineka tunggal Ika, dan komitmen pada negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan secara sadar dan terancang pesera didik berdasarkan perkembangan psikologi dan lingkup kehidupannya secara sisemik dengan cara memfasilitasi dalam proses belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, belajar pada siklus dan melalui proses interaksi sosial, komunikasi, dan kolaborasi secara demokratis, dan

belajar untuk membangun kehidupan demokrasi, bahwa PPKn sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan dieksplorasi untuk tujuan mengembangkan keterampilan dan watak yang dapat berguna secara demokratis.

2.1.3.3. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

PPKn memiliki kedudukan sebagai pendidikan nilai, moral, karakter, dan juga kewarganegaraan secara khas dan sesuai di Indonesia. PPKn sebagai media dalam pengembangan kemampuan psikososial kewarganegaraan yang terintegrasi dengan pengembangan watak sesuai dengan pendidikan moral dan karakter pancasila. Winarno & Setiawan, (2018) mengemukakan melalui pembelajaran PPKn untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari cakupan kajian sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai dasar filsafah negara, ideologi nasional dan sebagai pandangan hidup bangsa.
2. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi tertulis yang menjadi landasan konstitusional bagi kehidupan bernegara.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesepakatan final mengenai bentuk Negara Republik Indonesia.
4. Bhineka Tunggal Ika sebagai esesnsi yang berisikan filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan di Indonesia.

2.1.4. Pentingnya Penerapan Tata Tertib dan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa

2.1.4.1. Keterkaitan Tata Tertib Dalam Membentuk Karakter Disiplin

Penerapan tata tertib merupakan bentuk sebuah prosedur pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan di sekolah sebagai upaya pengembangan disiplin peserta didik melalui peraturan yang dibuat. Sebagai sesuatu yang harus ditaati, Tujuan dari sebuah peraturan adalah untuk membekali anak dengan asas berperilaku sesuai yang disetujui dalam keadaan tertentu. Contohnya dalam lingkup peraturan sekolah, terdapat batasan terhadap tingkah laku yang diperbolehkan dilakukan dan tingkah laku yang dilarang berdasarkan aturan sekolah tersebut. hal tersebut merupakan wujud agar terciptanya kelancaran, ketertiban, dan kedamaian pada proses mendidik siswa. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan Aragam et al., (2022) komponen yang melekat dari disiplin sekolah dengan berupa bentuk-bentuk hukuman yang berhubungan dengan proses pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan intrinsik siswa untuk belajar. Selain itu penerapan program sekolah seperti halnya peraturan dalam menumbuhkan kedisiplinan dapat berdampak positif dalam pendidikan karakter. Sikap positif yang tercermin dalam proses pembelajaran salah satunya etika kerja, dan memahami jenis perilaku yang benar dan diterima secara sosial, tidak hanya di sekolah, tetapi komunitas global tempat tinggal mereka.

2.1.4.2. Keterkaitan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam membentuk Karakter Disiplin Pembelajaran PPKn berkontribusi besar dalam membentuk karakter peserta didik. PPKn merupakan suatu pendidikan dasar yang dibuat guna menyiapkan warga negara muda dapat berperan secara aktif dalam kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, penting dalam menggali

dan membuat keputusan sesuai pengetahuan, serta melaksanakan hak dan kewajiban suatu masyarakat demokratis dalam PPKn. Melalui pembentukan karakter dalam pembelajaran PPKn khususnya kedisiplinan dalam mendidik para peserta didik melakukan tindakan yang tidak tertib dan menaati aturan, perlu dukungan dari semua aspek dalam menanamkan akhlak yang baik pada peserta didik. Sebagai cara dalam mendisiplinkan siswa, proses pembelajaran PPKn melalui guru bidang studi dapat mengamati serta mengembangkan pengetahuan peserta didik seperti saling berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang dikaitkan dalam pembelajaran PPKn. Berdialog dan melakukan interaksi sangat penting dalam pengembangan karakter peserta didik. Pembelajaran yang aktif membutuhkan kerjasama dimana penempatan peserta didik dalam kelompok dan memberinya tugas, sehingga peserta didik dapat mempelajari hal yang baru, memecahkan masalah, dan menerapkannya dalam kehidupan mereka.

2.1.4.3. Hubungan Tata Tertib dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam Membentuk Karakter Disiplin Sekolah merupakan tempat proses untuk tumbuh kembangnya peserta didik agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan menjadi generasi penerus bangsa dimasa yang datang. Supaya terbentuk karakter disiplin peserta didik, penting dalam mengatur tata tertib dan proses belajar mengajar di sekolah. Seperti yang dijelaskan Simanjuntak et al., (2023) bahwa pendidikan karakter dan PPKn merupakan tujuan paling penting pendidikan yang diintegrasikan melalui manajemen sekolah, membawa siswa merefleksikan nilai-nilai kritis dalam kehidupan.

Dalam pengembangan disiplin peserta didik Tutik Rachmawati dan Daryanto, (2023) mengemukakan beberapa hal, diantaranya :

1. Menumbuhkan pemikiran dan kesadaran serta perasaan positif siswa terhadap manfaat dari disiplin bagi perkembangan diri.
2. Menumbuhkan pandangan dan perasaan positif siswa akan aturan dan fungsi dari menaati peraturan dalam kehidupan
3. Menumbuhkan kapasitas siswa agar mampu menyelaraskan diri secara sehat
4. Menumbuhkan kapasitas siswa pada hal kontrol internal dalam berkepribadian sebagai asas perilaku disiplin
5. Menjadi contoh dan menumbuhkembangkan keteladanan
6. Menumbuhkan struktur dan mekanisme penguatan positif maupun negatif dalam menegakkan disiplin di sekolah.

Sebagai suatu proses dalam menanamkan perilaku positif pada peserta didik, tata tertib menjadi tolak ukur terhadap kedisiplinan siswa. Sedangkan pembelajaran PPKn sebagai usaha sadar siswa dalam menyikapi perbuatan yang baik dan benar sesuai akal pikiran. Disiplin moral menjadi dalih dalam menumbuhkembangkan siswa agar menghargai peraturan, menghargai sesama, dan pengakuan guru. Upaya tersebut dapat diinterpretasikan melalui pengelolaan tata tertib dan pembelajaran PPKn sebagai upaya dalam membentuk karakter peserta didik khususnya disiplin.

2.2. PENELITIAN RELEVAN

Rachmawati et al., n.d. (2019) tentang “Penerapan Tata Tertib Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik Pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Baru”. Ditemukan bahwa ada pengaruh penerapan tata tertib terhadap

pembentukan karakter peserta didik, yaitu menjadikan peserta didik memiliki rasa tanggung jawab atas hak-hak dan kewajiban sehingga mampu memelihara disiplin, ketaatan, kepatuhan, dan jujur. Termasuk juga kerja sama tenaga pendidik serta sarana prasarana yang lengkap sebagai faktor pendukung dalam membentuk karakter peserta didik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai pendidikan karakter dan tata tertib sekolah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan di sekolah yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di MAN 2 Makasar sedangkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti dilakukan di SMAN 1 Teladan Yogyakarta. Kemudian dari segi pendidikan karakter, peneliti difokuskan lebih spesifik pada pendidikan karakter disiplin serta bagaimana peran pembelajaran PPKn dalam membentuk karakter disiplin.

Aragam et al., (2022) tentang “Peran Guru Dalam Mengembangkan Karakter Disiplin Pada Siswa Kelas XI Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”. Penelitian yang dilakukan di SMAN 1 Sanggau Kabupaten Sanggau ini mendapatkan temuan penelitian ini yaitu proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan oleh guru dengan membiasakan siswa untuk taat terhadap peraturan sekolah, menumbuhkan sikap sopan santun, beretika, dan bertanggung jawab. Selain guru memiliki peran sebagai pendidik, guru berperan sebagai motivator dalam proses pembelajaran dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya karakter disiplin. Adapun upaya yang dilakukan guru memberikan contoh keteladanan, memberi sanksi kepada siswa yang kurang disiplin sesuai dengan kontrak belajar. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait pendidikan karakter dan pembelajaran PPKn. Perbedaannya yaitu

penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda dimana Sulha dan Marsianus Gani dilakukan di SMAN 1 Sanggau Kalimantan Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di SMAN 1 Teladan Yogyakarta. Selanjutnya penelitian yang sudah dilakukan peneliti tidak hanya terkait pendidikan karakter disiplin melalui PKn tetapi bagaimana pembentukan karakter disiplin melalui tata tertib sekolah.

Putritama & Wadi, (2022), Strategi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Peserta didik di SMAN 1 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki temuan bahwa strategi guru PKn dalam membentuk karakter siswa di sekolah diintegrasikan melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung, membiasakan berpakaian rapi, membiasakan sholat berjamaah, dan membiasakan berkata sopan santun. Kemudian menciptakan suasana melalui budaya sekolah seperti bersalaman dengan guru, peduli lingkungan, taat aturan sekolah. Selanjutnya pengintegrasian nilai dan etika pada pelajaran seperti metode diskusi yaitu dengan mengembangkan nilai kerjasama, tanggung jawab, memecah masalah, dan menghargai pendapat orang lain. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait pendidikan karakter dan PKn. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan ditempat yang berbeda dimana Dimas Ikhsan Susetyo dkk dilakukan di SMAN 1 Ponorogo dan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di SMAN 1 Teladan Yogyakarta. Secara rinci penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada karakter disiplin melalui tata tertib dan PKn sedangkan Dimas Ikhsan Susetyo pendidikan karakter secara umum.

2.3. KARANGKA BERPIKIR

Melihat dari maraknya kenalakan remaja yang didominasi para pelajar mengarah kepada perilaku negatif dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. perilaku-perilaku tersebut sangat mengkhawatirkan dimana perbuatan tersebut terkadang terjadi saat jam sekolah. Perilaku seperti ini yang dapat merusak moral generasi penerus bangsa, memudarnya karakter didalam diri peserta didik sehingga tindakan anarkis hingga kriminal dengan mudah dilakukan. Pembentukan karakter sejak dini merupakan kunci agar anak-anak tidak rusak mengikuti tren sekitarnya yang kian semakin meresahkan Maka dari itu pentingnya suatu strategi sebagai suatu cara dalam mencegah dan mengatasi perilaku yang negatif pada peserta didik. Karena sekolah sebagai tempat mengajar sekaligus mendidik anak untuk mengasah kemampuan 61 kognitif, afektif, dan psikomotik sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berlandaskan Pancasila.

Tata tertib sekolah menjadi salah satu bentuk dalam mendisiplinkan siswa agar taat terhadap aturan. Dalam hal ini diperlukannya kedisiplinan dan ketegasan pihak sekolah dalam menerapkan peraturan untuk warga sekolah, penerapan tata tertib yang benar-benar mengikat siswa selama proses mengajar dan pembelajaran.

Dalam penerapannya, tata tertib memiliki berbagai jenis sistem yang bisa menjadi acuan dalam menerapkan disiplin disekolah. Salah satunya sistem skorsing, sebagai sebuah sistem yang mengatur dan mengikat untuk lingkungan sekolah khususnya siswa, sistem poin ini merupakan terobosan dalam membentuk dan membangun karakter disiplin siswa menjadi lebih taat terhadap aturan. Ini yang harusnya ditanamkan sejak dini pada generasi muda agar menjadi penerus

bangsa yang bermoral dan berkarakter. Perlu dukungan penuh semua stakeholder yang ada mulai dari kepala sekolah, guru, staf sekolah dan juga peran orang tua agar tata tertib dapat terlaksana.

Meskipun dalam penerapannya masih ada kekurangan dan kelemahan, ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi sekolah dalam menerapkannya. Dengan begitu dari pembiasaan yang diterapkan, karakter disiplin pada peserta didik akan terbentuk selama proses pembelajaran yang ada di sekolah. Selain itu melalui pelajaran di kelas sangat berpengaruh pada perkembangan karakter anak khususnya disiplin, karena melalui pembelajaran guru bisa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada proses pelajaran, memberikan pemahaman tentang karakter dan sebagainya.

Begitu juga pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang bertujuan menjadi warga negara yang baik, berkarakter, dan mampu berfikir kritis, diharapkan mempunyai peluang besar dalam membentuk karakter disiplin anak melalui proses pembelajaran di kelas. Maka dari itu melalui penerapan tata tertib, pembiasaan kedisiplinan, dan proses pembelajaran PPKn di kelas harus beriringan dan benar-benar terlaksana dengan baik, agar karakter disiplin siswa dapat terbentuk. Semua itu bertujuan agar siswa dapat mengendalikan perilaku dan mampu memberikan sikap positif baik itu di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Sehingga menjadikannya generasi penerus bangsa yang berkarakter dan menjadi warga negara yang baik.

2.4. Hipotesis Tindakan

Dari kajian teori dan rumusan masalah maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan karakter disiplin siswa melalui pembelajaran PPKn Madrasah Aliyah Kejuruan An-Nasir Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara semakin meningkat.
2. Pembentukan karakter disiplin siswa melalui pembelajaran PPKn Madrasah Aliyah Kejuruan An-Nasir Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara semakin menurun.
3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Yang dihadapi dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa melalui tata tertib dan PPKn di Madrasah Aliyah Kejuruan An-Nasir Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.